

**PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI,  
DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN  
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  
DI PROVINSI NTB**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**SYIFA KHOIRUNNISA**

**165020507111034**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2020**



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Upah Minimum, Invetasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB"

Yang disusun oleh :

Nama : Syifa Khoirunnisa  
NIM : 165020507111034  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **30 Juli 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

- 1. Eddy Suprpto , SE., ME.  
NIP. 195807091986031002 .....  
(Dosen Pembimbing)
- 2. Shofwan, SE., M.Si.  
NIP. 197305172003121002 .....  
(Dosen Penguji I)
- 3. Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., M.A.  
NIP. 195508151984031002 .....  
(Dosen Penguji II)

Malang, 30 Juli 2020

Ketua Program Studi

Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.  
NIP 197009221995121002

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Syifa Khoirunnisa**  
 Tempat, tanggal lahir : **Jakarta, 6 Agustus 1998**  
 NIM : **165020507111034**  
 Jurusan : **Ilmu Ekonomi**  
 Program Studi : **S1 Ekonomi Islam**  
 Alamat : **Jl. Tanjung 11 No.8 Kranggan Permai, Jatisampurna, Bekasi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagian atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Juli 2020  
 Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing,



Eddy Suprpto, SE., ME.  
 NIP. 195807091986031002



Syifa Khoirunnisa  
 165020507111034

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 S1 Ekonomi Islam



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.  
 NIP 197009221995121002

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB”. Adapapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta serta kakak kandung saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Eddy Suprpto, SE., ME selaku Dosen Pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, nasihat, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penulisan penelitian ini sehingga skripsi saya dapat selesai dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada Prof dan Keluarga.
3. Bapak Shofwan, SE., M.Si dan Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., M.A. selaku Dosen Penguji I dan II atas semua arahan, kritik, dan masukan yang telah diberikan terkait penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc), Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

5. Bapak Dr. rer. Pol, Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Bapak Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
7. Kepada Tutor Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Mas Hidsal yang sudah memberikan bantuan serta saran dan kritik selama proses kepenulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperbimbingan skripsi Nabila Haliza, Devi, Ervina, Pandu dan Salsavia yang sama-sama berjuang dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat saya sejak awal perkuliahan hingga sekarang Della, Fitriana, Ghina, dan Sefi, yang selalu memberikkan semangat dan bantuan selama kepenulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi 2016 yang sedang berjuang meneruskan kuliahnya dan yang sedang berjuang menghadapi dunia pasca sarjana semoga selalu semangat megapai harapan dan cita-citanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga proses kelulusan saya.

Semoga Tuhan memberikan berkah dan kasih saying-Nya kepada kita semua. Kepada pihak-pihak di atas saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena mungkin tanpa kehadiran dan bantuannya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kepenulisan ini, oleh karena itu saya harapkan jika ada kritik dan saran

yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penelitian ini tidak perlu sungkan untuk menyampaikannya kepada saya. Akhir kata, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Malang, 30 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
ABSTRACTION.....	xv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
2.1. Kerangka Teori.....	7
2.1.1. Upah Minimum Provinsi.....	7
2.1.2. Investasi.....	9
2.1.3. Pariwisata.....	11
2.1.4. Pengangguran.....	15
2.1.5. Penyerapan Tenaga Kerja.....	18
2.1.6. Hubungan Tingkat Upah dengan Pengangguran.....	19
2.1.7. Hubungan Investasi Dengan Pengangguran.....	20
2.1.8. Hubungan Antara Jumlah Wisatawan dengan Pengangguran.....	20



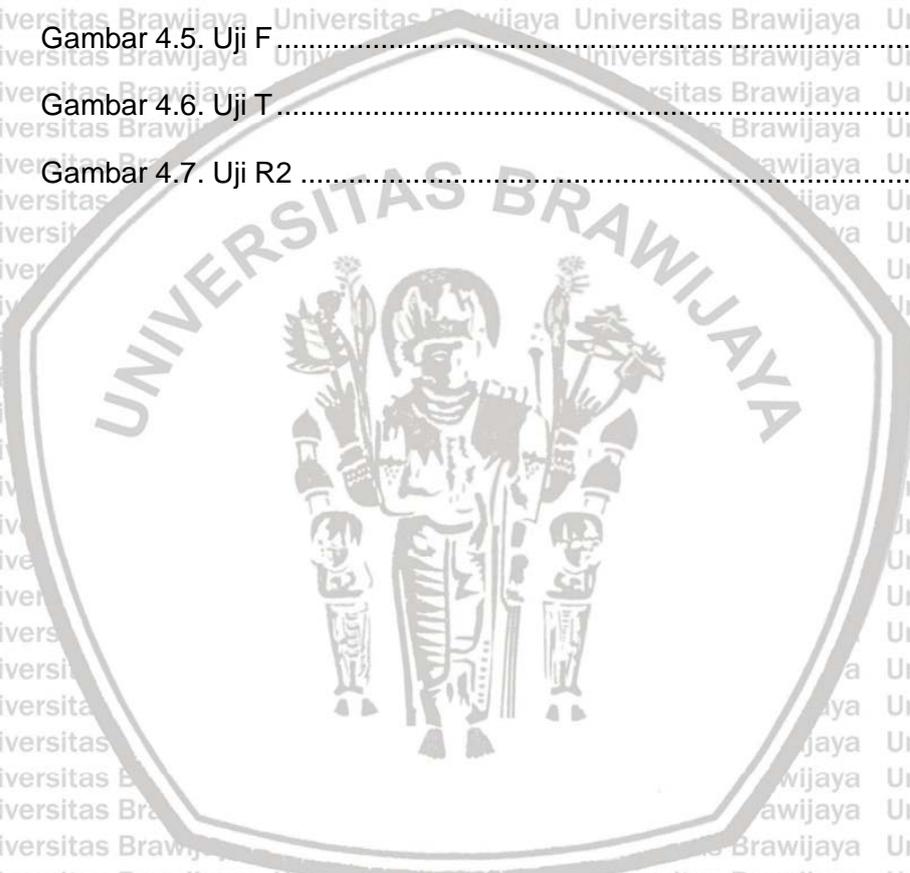
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	21
2.3.	Kerangka Pikir .....	25
2.4.	Hipotesis .....	30
<b>BAB III .....</b>		<b>31</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	31
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3.	Definisi Operasional Variabel .....	33
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5.	Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV .....</b>		<b>39</b>
4.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	39
4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian .....	40
4.2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) .....	40
4.2.2.	Upah Minimum (X1) .....	41
4.2.3.	Investasi Pariwisata (X2) .....	42
4.2.4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (X3) .....	43
4.3.	Hasil Penelitian .....	44
4.3.1.	Uji Asumsi Klasik .....	44
4.3.2.	Uji Hipotesis .....	47
4.4.	Pembahasan dan Implikasi Penelitian .....	50
4.4.1.	Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB .....	50
4.4.2.	Analisis Pengaruh Investasi Pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB .....	52
4.4.3.	Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB .....	53
<b>BAB V .....</b>		<b>56</b>
5.1.	Kesimpulan .....	56

5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Pulau Nusa Tenggara dan Bali.....	4
Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB.....	40
Gambar 4.2. Invetasi sektor Pariwisata.....	42
Gambar 4.3. Uji Multikolinearitas.....	45
Gambar 4.4. Uji Autokorelasi.....	46
Gambar 4.5. Uji F.....	47
Gambar 4.6. Uji T.....	48
Gambar 4.7. Uji R2.....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1. Devinisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2018.....	39
Tabel 4.2. Upah Minimum Provinsi NTB.....	41
Tabel 4.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Prvinsi NTB.....	43



**ABSTRAKSI**

**Syifa Khoirunnisa. 2020. Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Eddy Suprpto, SE., ME.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan variabel UMP (X1), Investasi (X2), dan Jumlah Kunjungan Wisatawan (X3) sebagai variabel independen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series meliputi data Upah, Investasi, Pariwisata, dan Pengangguran tahun 2000-2019. Data sekunder penelitian ini berasal dari laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sementara Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB.

**Kata kunci :** Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi, Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Pengangguran.

**ABSTRACTION**

**Syifa Khoirunnisa. 2020. The Effect of Minimum Wages, Investment, and Number of Tourist Visits on Unemployment Rate in NTB Province.**

**Thesis, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Eddy Suprpto, SE., ME.**

This study aims to determine the effect of the Minimum Wage, Investment, and Number of Tourist Visits on the Unemployment Rate in NTB Province. This study uses the variable UMP (X1), Investment (X2), and Number of Tourist Visits (X3) as independent variables and the Open Unemployment Rate (Y) as the dependent variable. The data used in this study are secondary time series data including data on wages, investment, tourism, and unemployment for the years 2000-2019. The secondary data for this research comes from the statistical reports of the Central Statistics Agency (BPS) and the Investment Coordinating Board (BKPM). The method of analysis of this research is using multiple linear regression analysis. The results showed that the Provincial Minimum Wage (UMP) and Tourism Investment variables had a significant influence on the Open Unemployment Rate. Meanwhile, the number of tourist visits has an insignificant effect on the level of open unemployment in NTB Province.

**Keywords: Provincial Minimum Wage (UMP), Investment, Number of Tourist Visits, and Unemployment.**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *aggregate demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban dalam pembangunan. Ada 2 pandangan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Pandangan pertama menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pandangan kedua menyatakan bahwa penduduk yang besar merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya persoalan penduduk merupakan beban atau modal pembangunan ekonomi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar kecil jumlahnya. Akan tetapi, juga tergantung pada kualitas dan kapasitas penduduk sendiri (Sofyardi, 1999).

Permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini adalah jumlah angkatan kerja yang besar dan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Sementara itu, kesempatan kerja yang tersedia (*demand*) tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (*supply*). Akibatnya, tenaga kerja yang tidak tertampung di pasar kerja menjadi penganggur. Di sisi lain penduduk yang bekerja hampir setengahnya mempunyai kualitas rendah seperti berpendidikan SMTP atau kurang, kurang terampil sehingga tidak produktif. Dari

perspektif institusi/perusahaan yang mempekerjakan, tenaga kerja yang berkualitas rendah menjadi beban ekonomi. Secara akumulatif dapat memperlambat produksi barang dan jasa, pada gilirannya dapat mengganggu pendapatan secara nasional. Lebih jauh, tenaga kerja dengan kualitas rendah tidak mampu bersaing, umumnya hanya bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang tidak menuntut keterampilan tinggi semisal menjadi buruh tani dan di sektor informal lainnya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik sebagai salah satu sumber penghasil devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata perlu dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan, pemanfaatan sumber dan potensi pariwisata nasional, sehingga diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Heriawan, 2002). Sektor pariwisata yang salah satunya terbentuk melalui sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran, secara signifikan memiliki kontribusi yang positif terhadap penerimaan devisa negara.

Pariwisata merupakan salah satu cara efektif untuk mengulangi pengangguran, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak potensi pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dalam Rancangan Pembangunan Pariwisata 2015-2019, pemerintah Indonesia membagi sasaran pembangunan pariwisata kedalam dua bentuk, yaitu sasaran pertumbuhan dan sasaran pembangunan inklusif. Dalam sasaran pertumbuhan, terdapat dari tiga aspek utama antara lain: kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); kunjungan wisatawan asing; dan kunjungan wisatawan domestik. PDB tahun 2014 diperoleh 4,2 % dengan harapan mencapai 8 % di tahun 2019. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2014 terhitung mencapai 9

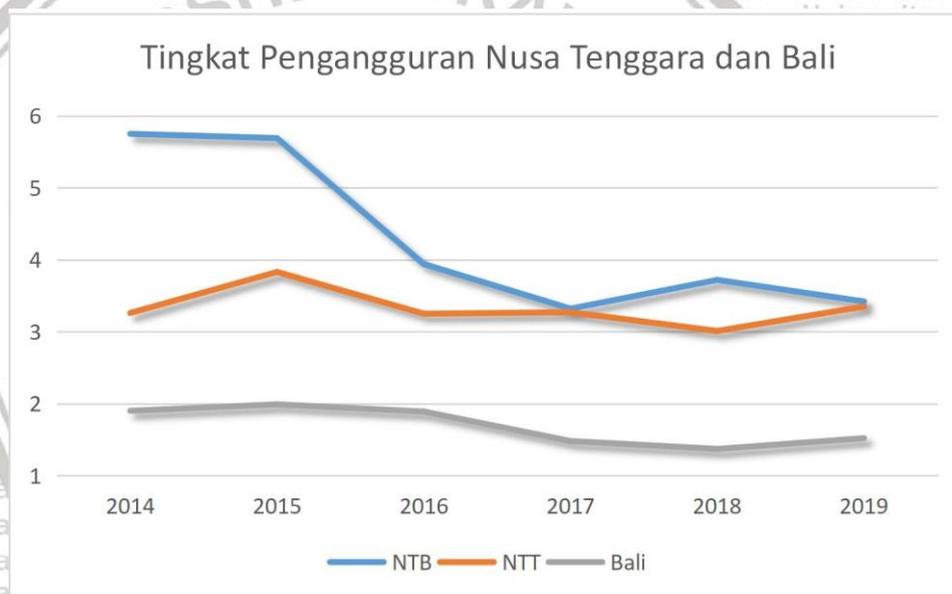
juta, dan diharapkan akan mencapai 20 juta di tahun 2019. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2014 terhitung 250 juta, dan mencapai 275 juta di tahun 2019. Adapun pendapatan devisa pada tahun 2014 mencapai 120 triliun rupiah dan perkiraan 240 triliun rupiah pada tahun 2019. Pada sektor pembangunan inklusif diharapkan mampu meningkatkan usaha lokal dalam industri pariwisata serta dapat meningkatkan tenaga kerja lokal yang tersertifikasi (BAPPENAS, 2014).

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kawasan pariwisata yang memiliki keindahan alam yang tepat untuk dijadikan destinasi wisata bagi para wisatawan. Bahkan pada 2015, Kemenpar menetapkan Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata syariah di Indonesia. Dari tiga wilayah tersebut, Kemenpar memilih Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata syariah unggulan Indonesia. Pilihan itu didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Setiap tahun menurut Menteri Pariwisata jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok sekitar 850.000 wisatawan, sementara wisatawan nusantara mencapai angka 2 juta wisatawan. Mayoritas wisatawan mancanegara berkunjung ke Lombok melalui Bali. Ini menunjukkan wisata Pulau Lombok belum begitu populer di kalangan wisatawan mancanegara. Mestinya dengan potensi wisatanya, Pulau Lombok mampu menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk langsung ke Lombok tanpa harus melalui Bali.

Hal yang sangat disayangkan ialah, tingginya angka wisatawan yang berkunjung ke Lombok tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga, pengangguran di Nusa Tenggara Barat masih tinggi dibandingkan dengan Bali dan juga Nusa Tenggara Timur yang sama-sama memiliki potensi dalam sektor Pariwisata. Ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat masih belum optimal dalam mengelola pariwisata untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam

gambar berikut, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka NTB pada tahun 2014 sebesar 5.75%, sementara untuk wilayah NTT sebesar 3.26% dan Bali sebesar 1.90%. Dan pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka NTB pada tahun sebesar 5.69%, sementara untuk wilayah NTT sebesar 3.83% dan Bali sebesar 1.99%. Lalu, tahun 2016 NTB mengalami penurunan angka pengangguran yang cukup besar menjadi 3.94%, sementara untuk wilayah NTT sebesar 3.25% dan Bali sebesar 1.89%. Dari angka yang kita dapat lihat tiap tahunnya, NTB masih harus bekerja keras untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada apabila dibandingkan dengan NTT maupun Bali.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Pulau Nusa Tenggara dan Bali



Sumber: BPS, dikelola penulis (2020)

Selain sektor pariwisata yang menunjang penyerapan tenaga kerja, menurut BPS, (2016) Faktor tingkat upah juga memengaruhi permintaan tenaga kerja. Ditinjau dari faktor upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk berkembang. Selain itu, menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan-permasalahan seperti pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang menyeluruh, sebab salah satu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian/pasar kerja. Untuk melihat fenomena itu, maka penelitian ini disusun dengan judul **“PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI NTB”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pokok yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang ekonomi regional, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengaruh upah minimum, investasi, dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat pengangguran di NTB sebagai bentuk dari peningkatan kualitas perekonomian wilayah. Adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pembangunan pariwisata.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Teori

#### 2.1.1. Upah Minimum Provinsi

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. (Asri, 2010: 107)

Menurut Hardijan Rusli, Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 3 adalah :

- 1) Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.

3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.

4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industry padat karya tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut :

- a. Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah tertentu;
- b. Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sector tertentu dalam daerah tertentu;
- c. Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP ditiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umum nya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.

Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit RP.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pasal 186 ayat 1 Undang-undang no 13 tahun 2003. Dalam hal ini, apabila pengusaha belum mampu membayar upah sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu. (Maimun: 51).

### 2.1.2. Investasi

#### a. Definisi Investasi

Menurut UU No.25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Sementara, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga (Sukirno, 2010) yaitu:

1. Autonomous investment, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek sosial budaya yang ada di masyarakat.
2. Induced investment, yaitu macam investasi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kenaikan pendapatan yang ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau penambahan permintaan terhadap barang sudah pasti akan mendorong untuk melakukan investasi.
3. Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga uang atas modal yang berlaku di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi dan Teknologi. Adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih.
2. Tingkat Perekonomian. Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan.

3. Tingkat Keuntungan Perusahaan. Makin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka makin banyak bagian laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi.

4. Situasi Politik. Jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi. Salah satu kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal, penanaman modal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Untuk investasi swasta di Indonesia yang dilakukan dengan kemudahan fasilitas berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

b. Pertumbuhan Investasi Daerah

Dalam teori dinamika pertumbuhan Harrod (Sumitro, 1994: 338) dikemukakan bahwa tambahan modal (investasi netto) dalam suatu periode ( $t$ ) menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode yang menyusul ( $t+1$ ). Dengan kata lain investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan berproduksi dan menambah pendapatan di masa datang ( $t+1$ ). Peningkatan pendapatan tersebut disamping untuk konsumsi juga akan diinvestasikan kembali, sehingga semakin memperbesar kapasitas produksi.

Hasil produksi yang semakin luas dinikmati pasar akan menyebabkan penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa semakin meningkat.

### 2.1.3. Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Secara internasional, konsep, definisi dan klasifikasi terkait dengan pariwisata terdapat pada **Tourism Satelite Account (TSA, 2008)**. Berdasarkan

definisi dari UNWTO, pariwisata (*tourism*) adalah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang didefinisikan sebagai pergerakan orang-orang di luar lingkungan negara atau tempat tinggal untuk tujuan pribadi atau bisnis/profesional, yang kebanyakan dilandasi oleh motif untuk rekreasi. Orang-orang ini disebut wisatawan (atau turis, baik yang berasal dari penduduk atau non-penduduk) yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, beberapa di antaranya dapat diukur lewat pengeluaran pariwisata. Di dalam TSA pariwisata dilihat dengan perspektif permintaan dan penawaran. Pariwisata dilihat dari sisi permintaan mengacu pada kegiatan wisatawan dan peran mereka dalam mendapatkan barang dan jasa. Pada sisi ini dijelaskan konsep terkait dengan durasi perjalanan, tujuan perjalanan, dan klasifikasi wisatawan. Kemudian, dijelaskan juga konsep dan cakupan, kategori mengenai pengeluaran wisatawan. Termasuk juga pembentukan modal pariwisata. Dari sisi penawaran, pariwisata dipahami sebagai rangkaian kegiatan produktif dalam melayani wisatawan. Di sisi ini dijelaskan definisi, klasifikasi produk pariwisata, karakteristik aktivitas pariwisata dan industri pariwisata (LPEM FEB UI, 2018).

Menurut rumusan Internasional Union Of Official Travel Organization (IUOTO) pada tahun 1963 subyek wisata atau pelaku perjalanan dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu wisatawan (Tourist) dan pelancong (Excursionists).

Perbedaan wisatawan dan pelancong adalah :

1. Wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang – kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut: a. Pesiari adalah untuk rekreasi, liburan, kesehatan, studi dan olah raga. b. Hubungan dagang, sanak saudara, konferensi dan misi.

2. Pelancong adalah penunjang sementara yang tinggal di negara yang dikunjungi kurang lebih 24 jam (termasuk pelancong dalam perjalanan kapal pesiar termasuk yang sedang transit di pelabuhan).

Berdasarkan Smith, Stephen L.S. 1998, wisatwan dalam kepariwisataan dapat digolongkan kedalam 5 bagian yaitu :

1. Domestic Tourism adalah pariwisata yang ditimbulkan oleh orang yang bertempat tinggal disuatu Negara yang mempunyai tempat di dalam Negara yang bersangkutan.
2. Inbound Tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan orang – orang yang bukan penduduk di suatu Negara.
3. Outbound tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan penduduk suatu negara ke negara lain.
4. Internal tourism adalah merupakan kombinasi antara domestik dan outbound tourism.
5. Internasional tourism adalah merupakan kombinasi inbound dan outbound tourism.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi wisatawan Internasional (mancanegara) adalah yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya, dan wisatawan didalam negerinya. Wisatawan Nasional menurut Biro Pusat Statistik adalah sebagai berikut : Wisatawan Nasional (Domestik) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 24 jam atau menginap untuk masuk apapun kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi (Direktorat Jendral Pariwisata,1985;17).

b. Indikator Permintaan Pariwisata

Indikator permintaan efektif merupakan hal yang terpenting dari sekelompok penduduk yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perjalanan atau bepergian (travel propensity). Travel propensity ini mengukur penetrasi keinginan melakukan perjalanan di kalangan penduduk tertentu.

Terdapat dua jenis travel propensity, yaitu :

1. Net Travel Propensity (NTP), yaitu kecenderungan netto untuk melakukan perjalanan wisata yang menunjukkan persentase dari jumlah penduduk yang melakukan perjalanan wisata minimum satu kali dalam periode waktu tertentu. Adanya komponen permintaan tertahan atau terselubung (suppressed demand) serta tidak ada permintaan (no demand) menjadi alasan bahwa travel propensity tidak akan mencapai angka 100%, walau pada negara maju sekalipun. Di negara-negara maju, angka travel propensity maksimum mencapai 70-80%.

2. Gross Travel Propensity (GTP), yaitu kecenderungan bruto untuk melakukan perjalanan wisata yang menunjukkan perbandingan antara jumlah keseluruhan perjalanan wisata yang dilakukan dengan jumlah penduduk dan dinyatakan dalam persen. Oleh karena itu, perjalanan liburan yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya akan dapat meningkatkan GTP dan angka GTP tersebut dapat melewati angka 100%.

Pada beberapa negara maju, GTP dapat mendekati 200%. Hal ini berarti dalam kurun waktu tertentu, diantara mereka ada yang bepergian lebih dari satu kali. Secara sederhana, frekuensi perjalanan (travel frequency) dapat dihitung dengan membagi GTP dengan NTP. Hasil perhitungannya akan memberikan gambaran tentang rata-rata jumlah perjalanan wisata yang dilakukan oleh sekelompok penduduk tertentu yang pernah melakukan perjalanan wisata.

### c. Penawaran Pariwisata

Penawaran pariwisata diartikan sebagai sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan kepada wisatawan dengan harga tertentu. Penawaran pariwisata meliputi semua daerah tujuan yang ditawarkan kepada wisatawan, baik wisatawan potensial maupun riil. Wisatawan potensial merupakan sejumlah orang yang memenuhi syarat minimal untuk melakukan perjalanan karena mempunyai cukup uang, keadaan fisik yang masih sehat, hanya saja belum mempunyai waktu untuk bepergian sebagai wisatawan. Sedangkan wisatawan riil (actual) merupakan sejumlah orang yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tujuan wisata tertentu. Penawaran pariwisata dapat berupa daya tarik alam, hasil ciptaan manusia, barang dan jasa yang dapat mendorong orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata.

#### Karakteristik Penawaran Pariwisata

1. Merupakan penawaran jasa-jasa yang tidak dapat ditimbun atau dipindahpindahkan dan hanya dapat dikonsumsi di tempat jasa tersebut dihasilkan.
2. Penawaran pariwisata sifatnya sangat kaku (rigid) artinya sangat sulit untuk mengubah sasaran penggunaannya di luar pariwisata.
3. Penawaran pariwisata sangat tergantung pada persaingan dari barang-barang dan jasa-jasa lainnya, sehingga hukum substitusi sangat kuat berlaku.

#### 2.1.4. Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti mengalami penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik

yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menurut BPS menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja.

Menurut Case and Fair (2004) dalam bukunya Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

a. Pengangguran Friksional (frictional unemployment)

Pengangguran Friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu merujuk pada pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Selain itu pengangguran Friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang

lain.

b. Pengangguran Musiman (seasonal unemployment)

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja.

c. Pengangguran Siklis (cyclical unemployment)

Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami 15 kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.

d. Pengangguran Struktural (struktural unemployment)

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan, menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibanding pengangguran friksional. Selain membutuhkan

pendanaan yang besar, juga waktu yang lama. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.

### 2.1.5. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Suparmoko (2002), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa. Sedangkan pengertian penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2000).

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002).

Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) ke dalam output atau keluaran. Hukum permintaan tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin rendah upah tenaga kerja maka semakin banyak permintaan tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar, maka pengusaha akan mencari

tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yang di antaranya adalah besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, upah dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Indikator Penyerapan Tenaga Kerja :

1. Perubahan Upah Minimum
2. Laju Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
3. Laju Pertumbuhan investasi

#### **2.1.6. Hubungan Tingkat Upah dengan Pengangguran**

Menurut Sukanto dan Karseno (2008 : 68) ada 3 hal yang dapat mengubah bentuk fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu (1) perubahan harga relatif tenaga kerja, (2) perubahan teknologi, dan (3) perubahan permintaan akan hasil produksi. Seandainya harga tenaga kerja tetap, sedangkan harga faktor produksi naik, maka upah minimum regional tenaga kerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja sampai fungsi produk fisik tenaga kerja batas sama dengan produk batas faktor produksi yang lain. Perubahan teknologi biasanya akan memperkecil permintaan akan tenaga kerja. Jadi tingkat upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk akan mendapat respon negatif dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dan pada akhirnya pengangguran akan meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya dapat dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, dimana peningkatan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang.

### **2.1.7. Hubungan Investasi Dengan Pengangguran**

Besar kecilnya investasi yang terjadi di masyarakat akan sangat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Adanya investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru. Adanya kesempatan kerja baru akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran. Jadi, antara investasi dan pengangguran terdapat hubungan negatif. Ini berarti jika tingkat investasi naik maka tingkat pengangguran akan turun. Tapi apabila investasi turun, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Namun apabila investasi yang ditanamkan bersifat padat modal, maka kenaikan investasi tidak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja.

### **2.1.8. Hubungan Antara Jumlah Wisatawan dengan Pengangguran**

Secara teoritis (apriori) dalam Ida Austriana (2005), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata juga akan semakin meningkat. Jika jumlah wisatawan meningkat maka pengusaha akan melakukan investasi pada sarana dan prasarana pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mengakomodirnya. Hal ini akan membuat dibutuhkan tenaga kerja untuk bekerja pada lapangan pekerjaan baru tersebut sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tujuh penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian tentang “Pengaruh Upah Minimum, Investasi, Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di NTB”. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mengkaji permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini.

Adapun kajian dahulu dapat ditampilkan sebagai tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang, Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Ni Luh Emi Damayanti, dan I Nengah Kartika (2016), “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan asing dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur atau path analysis	Berdasarkan analisis yang diperoleh hasil bahwa kunjungan wisatawan asing, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kunjungan wisatawan asing, investasi dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, Kunjungan wisatawan asing dan investasi juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

2.	<p>Anzas Fernando Sirait, Yulmardi, dan Adi Bhakti (2018), "Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi"</p>	<p>Penelitian ini bertujuan:</p> <p>1) perkembangan pengangguran terbuka, investasi, upah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Provinsi Jambi;</p> <p>2) pengaruh investasi, upah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.</p>	<p>Data dianalisis secara deskriptif serta model regresi berganda</p>	<p>1) Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi selama Tahun 2000-2016 adalah sebesar 5,44 persen pertahun. Investasi PMDN tumbuh rata-rata 1,16 persen, upah tumbuh rata-rata sebesar 1,54 persen, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,45 persen, inflasi rata-rata sebesar 8,96 persen, dan investasi tumbuh rata-rata 11,64 persen pertahun;</p> <p>2) Secara simultan, upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Secara parsial upah berpengaruh positif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, inflasi tidak berpengaruh signifikan dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.</p>
3.	<p>Tengko Sarimuda RB dan Soekarnoto, (2014), "PENGARUH PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi</p>	<p>Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi</p>	<p>Analisis data menggunakan regresi data panel.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi, berpengaruh signifikan</p>

	<p>UMK, INFLASI, DAN INVESTASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 - 2011”</p>	<p>terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.</p>		<p>terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.</p>
4.	<p>Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah, (2018), “UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA”</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum (UMP) dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan 6 provinsi di Pulau Jawa selama periode 2011-2016.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UMP tetap menjadi kendala terciptanya keadilan di pasar tenaga kerja karena menciptakan kekakuan harga.</p>

5.	Joaquín Alegre, Llorenç Pou and Maria Sard, (2018), "High Unemployment and Tourism Participation"	Studi ini meneliti keputusan partisipasi pariwisata individu selama penurunan ekonomi di seluruh dunia.	Penelitian ini menggunakan informasi dari Eurobarometer yang berupa survei.	Hasil yang diperoleh untuk satu set negara Uni Eropa menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki efek positif pada kemungkinan tidak pergi liburan. Efek ini muncul ketika ada tingkat pengangguran lebih dari 10%.
6.	Dr. Kamal Banskota, (2012), "Impact of Tourism on Local Employment and Incomes in Three Selected Destinations: Case Studies of Sauraha, Nagarkot and Bhaktapur".	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk "menilai berapa banyak dampak langsung pariwisata dalam ekonomi lokal dari destinasi yang telah dipilih."	Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner, dan menggunakan SPSS untuk menganalisisnya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pariwisata tidak dapat menyediakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan bagi semua orang di suatu wilayah dan tidak bisa menjadi solusi efektif untuk pembangunan ekonomi. Namun pariwisata dapat berkontribusi terhadap ekonomi lokal yang menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung dengan membeli makanan dan barang bukan makanan dari produsen lokal. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran 121 perusahaan yang mencapai US\$2,6 juta dollar untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

### 2.3. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dampak yang ditimbulkan oleh upah minimum, investasi, jumlah kunjungan dan pengeluaran wisatawan terhadap tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Barat. Dengan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



Sumber: Penulis, 2020

#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB
2. Diduga Investasi Pariwisata berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB
3. Diduga Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (untuk meramalkan suatu gejala).

Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen (alat pengumpul data) yang menghasilkan data numerikal (angka). Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokan data, menentukan

hubungan serta mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Kontrol, instrumen, dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Dengan demikian kesimpulan hasil uji hipotesis yang diperoleh melalui penelitian kuantitatif dapat diberlakukan secara umum.

Pendekatan kuantitatif seperti penjelasan di atas mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan dari pengambilan datanya yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur, thesis, jurnal, media internet, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan, serta data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan data times series selama 20 tahun yaitu dari tahun 2000-2019. Data diperoleh dari penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dalam penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjabarkan penelitian ini, maka penulis menuliskan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Skala Pengukuran	Pengukuran
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Rasio	Jumlah Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja
2.	Upah Minimum Provinsi	Upah minimum regional yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2000-2019 yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2016).	Interval	Upah Minimum Nominal pada provinsi NTB tahun $t$ dalam satuan ribu rupiah.
3.	Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU, 2007).	Interval	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA sektor Pariwisata.
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke tempat yang dikunjungi yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam (UNWTO)	Interval	Jumlah Wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang tahun $t$ ke Provinsi NTB.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data skunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi terhadap hasil laporan dan hasil publikasi

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari hasil laporan maupun hasil dari publikasi dari instansi – instansi atau lembaga yang terkait dengan variabel penelitian ini.

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat catatan yang bersumber pada bahan – bahan pustaka yang mendukung dan memiliki kaitan dengan upah minimum, pariwisata, dan tingkat pengangguran beserta variabel – variabel terkait di dalamnya.

### 3.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, \dots, k$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengangguran Terbuka

X<sub>1</sub> : Upah Minimum Provinsi

X<sub>2</sub> : Investasi Pariwisata

X<sub>3</sub> : Jumlah Kunjungan Wisatawan

e : *Standard Error*

Pada saat melakukan Analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pembahasan singkat dari uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, antara lain Uji Chi Kuadrat, Uji Lilliefors, Uji Kolmogorov-Smirnov dan dengan grafik.

### 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada

sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan  $VIF = 1/\text{tolerance}$ , dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya.

Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (DW), yaitu:

Jika nilai DW terletak antara  $du$  dan  $(4 - du)$  atau,

$du \leq DW \leq (4 - du)$  berarti bebas dari autokorelasi, sebaliknya Jika nilai

$DW < dL$  atau  $DW > (4 - dL)$  berarti terdapat autokorelasi.

Nilai  $dL$  dan  $du$  dapat dilihat pada tabel Durbin Watson, yaitu nilai  $dL$  ;

$du$  ;  $\alpha$  ;  $n$  ;  $(k-1)$ .

Keterangan:

$n$  adalah jumlah sampel

$K$  adalah jumlah variabel

$\alpha$  adalah taraf signifikan.

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji koefisien regresi parsial (Uji t) dan uji koefisien bersama (Uji F).

##### a. Uji t

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yang bertujuan untuk menguji parameter estimasi secara parsial dengan tingkat kepercayaan tertentu dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Uji signifikansi ini merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan keputusan menerima atau menolak  $H_0$  (hipotesis yang salah) berdasarkan nilai uji yang diperoleh dari data.

Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari masing-masing

variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 diterima jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau nilai  $sig > \alpha$  H0 ditolak jika nilai

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$

#### b. Uji F

Untuk mengetahui proporsi variabel dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis varians (uji F). Tujuannya adalah untuk menguji variabel independen manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan derajat kebebasan tertentu, nilai F dapat menunjukkan nilai kemiringan yang sebenarnya dari model. Uji F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas (Y). Dengan kinerja pengujiannya sebagai berikut:

H0 diterima jika tingkat signifikansi  $> 0,05$

H1 diterima jika tingkat signifikansi  $< 0,05$

#### c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghazali (2013:97) koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan Adjusted R<sup>2</sup> karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi tersebut.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau yang ada, terdapat 40 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota Mataram, Pulau Lombok. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan dan 1.140 desa/kelurahan.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 - 2020 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 mencapai 5.013.687 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 2.579.956 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1,192,110 juta jiwa dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 144,707 ribu jiwa. Berikut merupakan data jumlah penduduk yang ada di NTB:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lombok Barat	335,111	350,050	685,161
Lombok Tengah	444,480	494,929	939,409
Lombok Timur	555,241	636,869	1,192,110
Lombok Utara	107,729	110,804	218,533
Bima	240,993	242,908	483,901
Sumbawa	231,486	222,311	453,797

Sumbawa Barat	73,382	71,325	144,707
Dompu	125,816	123,063	248,879
Kota Mataram	236,226	241,250	477,476
Kota Bima	83,267	86,447	169,714
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2,433,731</b>	<b>2,579,956</b>	<b>5,013,687</b>

Sumber: BPS, diolah 2020

## 4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

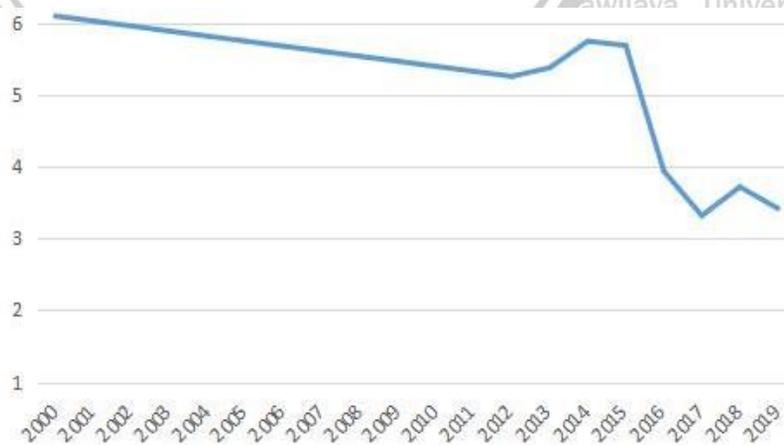
### 4.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

Variabel terikat (variable dependent) dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT yang digunakan dalam penelitian ini merupakan TPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah beberapa tahun

Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung stagnan (tidak mengalami perubahan yang signifikan), pada tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini terjadi karena penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan angkatan kerja, yang mendukung penurunan tingkat pengangguran di NTB. Berikut merupakan

Grafik TPT NTB dari tahun 2000-2019:

Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB



Sumber: BPS, diolah 2020

#### 4.2.2. Upah Minimum (X1)

Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Berikut merupakan data Upah Minimum Provinsi NTB:

Tabel 4.2. Upah Minimum Provinsi NTB

No	Tahun	UMP	Pertumbuhan UMP (persen)
1.	2000	160,000	33.33
2.	2001	240,000	25.00
3.	2002	320,000	14.67
4.	2003	375,000	9.09
5.	2004	412,500	13.16
6.	2005	475,000	13.64
7.	2006	550,000	14.73
8.	2007	645,000	11.64
9.	2008	730,000	12.31
10.	2009	832,500	6.54
11.	2010	890,775	6.23
12.	2011	950,000	5.00
13.	2012	1,000,000	9.09
14.	2013	1,100,000	9.09
15.	2014	1,210,000	9.02
16.	2015	1,330,000	10.31

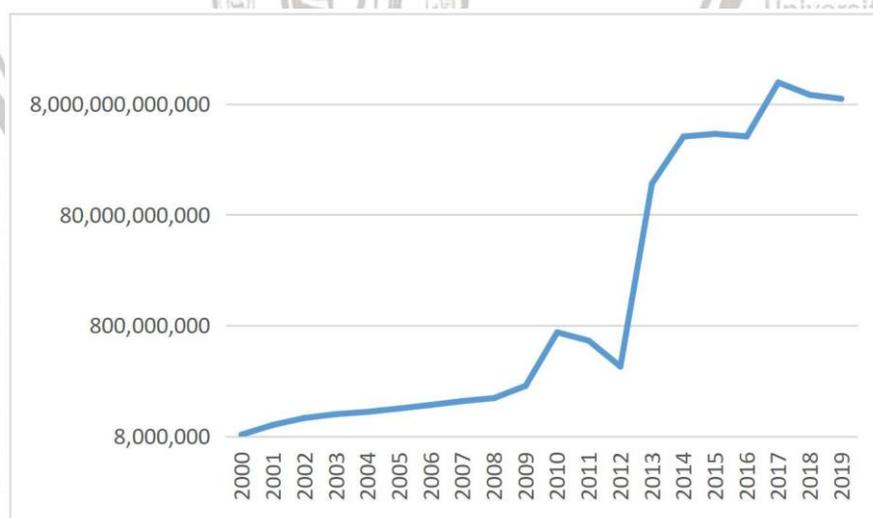
17.	2016	1,482,950	9.09
18.	2017	1,631,245	10.62
19.	2018	1,825,000	9.32
20.	2019	2,012,610	7.84

Sumber: BPS, diolah 2020

#### 4.2.3. Investasi Pariwisata (X2)

Investasi terbagi menjadi 11 sektor ekonomi, yaitu: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Perhubungan, Ketenagalistrikan dan Jasa-jasa. Namun, untuk penelitian kali ini, sektor yang digunakan ialah sektor pariwisata yang di dalamnya sudah termasuk investasi perhotelan dan juga jasa wisata. Investasi sektor pariwisata digunakan karena penelitian ini mencoba untuk melihat seberapa besar pengaruh investasi sektor pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut merupakan data investasi sektor pariwisata dari tahun ke tahun yang cenderung terus meningkat:

Gambar 4.2. Invetasi sektor Pariwisata



Sumber: BPS, diolah 2020

#### 4.2.4. Jumlah Kunjungan Wisatawan (X3)

Jumlah setiap pengunjung mancanegara maupun domestik yang melakukan perjalanan ke tempat yang dikunjungi yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam dengan tujuan tertentu (bisnis dan profesional, atau personal).

Berikut merupakan data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi NTB:

Tabel 4.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Prvinsi NTB

No.	Tahun	Kunjungan Wisatawan
1.	2000	179,014
2.	2001	119,343
3.	2002	238,686
4.	2003	279,710
5.	2004	307,681
6.	2005	354,299
7.	2006	481,101
8.	2007	619,370
9.	2008	544,502
10.	2009	410,241
11.	2010	725,388
12.	2011	886,880
13.	2012	1,162,512
14.	2013	1,357,602
15.	2014	1,629,122
16.	2015	2,210,527
17.	2016	3,094,437
18.	2017	3,508,903
19.	2018	2,812,379
20.	2019	2,390,899

Sumber: BPS, diolah 2020

### 4.3. Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Pada saat melakukan Analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Adapun pengujianya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu:

##### a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode kolmogorov-smirnov. Normalitas data dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0.075 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan pada hasil penelitian ini menunjukkan data terdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas memenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB. (Lihat gambar pada lampiran 1).

##### b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan  $VIF = 1/\text{tolerance}$ , dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan

adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.3. Uji Multikolinieritas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	134.761	8.105		16.627	.000		
	Upah	-10.768	.917	-1.466	-11.745	.000	.168	5.970
	Inves	.440	.112	.486	3.924	.001	.170	5.880
	Kunjungan	.687	.817	.136	.841	.413	.100	10.008

a. Dependent Variable: TPT

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- 1) Nilai VIF untuk variabel Upah Minimum Provinsi sebesar  $5,970 < 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0,168 > 0,10$  sehingga variabel Upah Minimum Provinsi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) Nilai VIF untuk variabel Investasi Pariwisata sebesar  $5,880 < 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0,71 > 0,10$  sehingga variabel Investasi Pariwisata dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 3) Nilai VIF untuk variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar  $10,008 > 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0,10 = 0,10$  sehingga variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan

pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson berikut:

Gambar 4.4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.950	1.144	1.116

a. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

b. Dependent Variable: TPT

Pada gambar 4.4. dapat dilihat nilai Durbin Watson untuk penelitian ini adalah sebesar 1.116 yang dengan nilai ini maka nilai Durbin Watson lebih kecil dari nilai DU. Penentuan DU diperoleh dari tabel Durbin Watson dan diketahui  $k=3$   $N=20$  hasil yang diperoleh adalah batas atas (DU) = 1.676. Dan  $4 - (DU) = 2.324$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat masalah autokorelasi. Hasil pengujian ini dapat dinyatakan model terdapat penyimpangan asumsi klasik uji autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas.

Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti terjadi heretoskedastisitas pada model regresi. (Lihat lampiran 4).

### 4.3.2. Uji Hipotesis

#### a. Pengujian hipotesis secara simultan (uji f)

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Gambar 4.5. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480.025	3	160.008	122.307	.000 <sup>b</sup>
	Residual	20.932	16	1.308		
	Total	500.957	19			

a. Dependent Variable: TPT

b. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

Dari hasil regresi, yang ditunjukkan pada gambar 4.5 pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (X1), Investasi Pariwisata (X2), dan Jumlah Kunjungan Wisatawan (X3), terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), maka diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan simultan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### b. Pegujian hipotesis secara parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel upah minimum, investasi pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan secara individual dalam menerangkan variasi variabel tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB.

Gambar 4.6. Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	134.761	8.105		16.627	.000		
	Upah	-10.768	.917	-1.466	-11.745	.000	.168	5.970
	Inves	.440	.112	.486	3.924	.001	.170	5.880
	Kunjungan	.687	.817	.136	.841	.413	.100	10.008

a. Dependent Variable: TPT

Pada gambar 4.6 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variabel pada persamaan Upah Minimum Provinsi (X1), Investasi Pariwisata (X2), dan Jumlah Kunjungan Wisatawan (X3) secara parsial terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada  $\alpha = 5\%$ . Dapat dilihat dari nilai Probabilitas t-statistic  $0.000 < \alpha$ . Nilai Koefisien upah minimum provinsi sebesar -10,768 menunjukkan setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,768%.
2. Variabel Investasi Pariwisata berpengaruh secara positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada  $\alpha = 5\%$ . Dapat dilihat dari nilai Probabilitas t-statistic  $0.001 < \alpha$ . Nilai Koefisien investasi pariwisata sebesar 0,440 menunjukkan setiap kenaikan investasi pariwisata sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,440%.
3. Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada  $\alpha = 5\%$ . Dapat dilihat dari nilai Probabilitas t-statistic  $0,687 > \alpha$ . Nilai

Koefisien jumlah kunjungan wisatawan sebesar 0,687 menunjukkan setiap kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,687.

c. Koefisien Determinasi Ganda ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi untuk tiga variabel bebas ditentukan dengan R square, adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:

Gambar 4.7. Uji  $R^2$

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.950	1.144	1.116

a. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

b. Dependent Variable: TPT

Dari gambar hasil regresi di atas pengaruh variabel variabel Upah Minimum Provinsi, Investasi Pariwisata, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan, terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,958. Hal ini berarti variasi dari variabel Upah Minimum Provinsi, Investasi Pariwisata, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan, terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB adalah sebesar 95,8 persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 4,2 persen.

#### **4.4. Pembahasan dan Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari regresi regresi linier berganda diatas maka didapatkan penjelasan penelitian ini sebagai berikut:

##### **4.4.1. Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi atau UPM berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Hasil ini sesuai dengan dugaan hipotesis penulis bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Kenaikan UMP mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan begitu juga bagi sektor usaha, kenaikan UMP tidak disikapi oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja tetapi dijadikan sebagai strategi penting dalam meningkatkan kinerja pekerja secara nyata, mendorong terpeliharanya kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Hal ini juga didukung oleh penelitian Tengkoek dan Soekarnoto (2014) bahwa UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 2007 – 2011. Hal ini terjadi karena kenaikan Upah yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota masih berada dibawah titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kekakuan upah.

Hukum permintaan tenaga kerja disebutkan bahwa semakin rendah upah dari tenaga kerja, maka semakin banyak permintaan dari tenaga kerja tersebut. Jika upah yang diminta besar, maka perusahaan akan mencari tenaga

kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain besarnya jumlah penduduk, harga dari tenaga kerja (upah) dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti terjadinya krisis moneter juga sangat mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian.

Upah merupakan salah satu barometer di dalam pengukuran berbagai macam kesejahteraan, oleh karena itu pemerintah berperan aktif untuk mengatur tentang upah. Jadi naiknya tingkat upah dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika upah meningkat maka dorongan seseorang untuk mencari pekerjaan semakin tinggi dan menyebabkan supply of labor meningkat. Dengan meningkatnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pengurangan jumlah pengangguran. Penelitian oleh Novlin dan Marhaeni (2013) juga mengatakan, naiknya upah minimum regional dapat mempengaruhi jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali dimana pengaruhnya negatif, berarti dengan meningkatnya upah maka dorongan untuk mencari pekerjaan/bekerja oleh penduduk semakin banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, Ikka (2014) juga mengatakan adanya pengaruh tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat dan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga kesempatan kerja mengalami kenaikan dan tingkat pengangguran akan berkurang.

#### 4.4.2. Analisis Pengaruh Investasi Pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Investasi Pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Hasil ini sesuai dengan dugaan hipotesis penulis bahwa investasi pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Rahmadin, Abubakar, dan M.Nasir (2013) bahwa Investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Aceh. Pengangguran di Provinsi Aceh lebih besar dipengaruhi oleh faktor-faktor selain Investasi dan pertumbuhan ekonomi seperti pengeluaran pemerintah, tingkat kesempatan kerja diberbagai sektor, kurangnya informasi yang didapat oleh pencari kerja, kreativitas pencari kerja yang masih kurang, lemahnya serikat buruh ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang tidak juga berakhir berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Selain itu, Ni Luh dan I Nengah (2016) juga berpendapat bahwa Kunjungan wisatawan asing dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Hasil ini juga dapat dikaitkan dengan pernyataan dari Todaro bahwa investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi karena dengan pembentukan modal dapat membentuk kapasitas produksi maupun menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya pembentukan lapangan pekerjaan baru secara tidak langsung investasi mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, secara teori hubungan investasi pemerintah dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Untuk mendukung

kapasitas produksi yang besar tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat dan pengangguran akan mengalami penurunan.

Pengaruh yang signifikan pada variabel investasi pariwisata disebabkan karena fokus dari investasi pariwisata merupakan padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu banyak. Disamping hal tersebut, untuk mempermudah pencari kerja, seluruh wilayah NTB diharapkan dapat memetakan potensi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga dengan adanya informasi pemetaan tersebut dapat membantu dalam upaya mendatangkan investor yang sesuai dengan potensi lapangan, dan ketidakcocokan perusahaan dengan tenaga kerja yang dicari yang selama ini banyak terjadi dapat diminimalisir. Didukung dengan Suparmoko (2002:41) hubungan investasi pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja yaitu dilihat dari sisi usaha menarik investor asing untuk menanamkan modal sehingga dapat meningkatkan investasi swasta, maka dari itu investasi pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong terciptanya lapangan usaha yang sekaligus dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran akan semakin berkurang di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **4.4.3. Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Hasil ini tidak sesuai dengan

dugaan hipotesis penulis bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB. Dari variabel tersebut mengindikasikan bahwa banyaknya wisatawan yang hadir masih belum mengurangi pengangguran yang ada. Hal ini terjadi karena wisatawan yang hadir tidak setiap saat, sehingga tenaga kerja yang menjadikan pekerjaan di sektor pariwisata sebagai pekerjaan utama dapat kehilangan pekerjaan begitu wisatawan kembali ke daerahnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dr. Kamal (2012) juga mengatakan bahwa, Pariwisata tidak dapat menyediakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan bagi semua orang di suatu wilayah dan tidak bisa menjadi solusi efektif untuk pembangunan ekonomi. Namun pariwisata dapat berkontribusi terhadap ekonomi lokal yang menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung dengan membeli makanan dan barang bukan makanan dari produsen lokal. Hal ini dapat dilihat dari 121 perusahaan yang ada di wilayah destinasi wisata yang menghabiskan US\$2,6 juta dollar untuk memenuhi kebutuhan pangan wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan tidak signifikan karena beberapa alasan, salah satunya ialah konsumsi yang dihabiskan oleh wisatawan tidak terserap dengan baik di wilayah wisata dan adanya kebocoran ekonomi di wilayah tersebut. Pengeluaran wisatawan cenderung agak fluktuatif. Meskipun diproyeksikan untuk tumbuh, pengaruh seperti preferensi konsumen, perbedaan generasi, iklim politik, dan kondisi ekonomi mengubah cara orang bepergian. Selain itu, menurut Stefan (2012), Peningkatan arus pariwisata yang masuk (permintaan wisata yang lebih tinggi) dalam perekonomian yang tidak memiliki akses ke pasar keuangan internasional hampir tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran keseluruhan ekonomi jika peningkatan permintaan

pariwisata eksogen, dan mengarah pada perubahan kecil dalam tingkat pengangguran sektoral berlawanan arah. Namun, jika peningkatan permintaan pariwisata datang bukan secara gratis tetapi disebabkan oleh pengeluaran iklan yang lebih tinggi, tingkat pengangguran keseluruhan ekonomi, serta tingkat pengangguran sektoral secara substansial menurun.



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

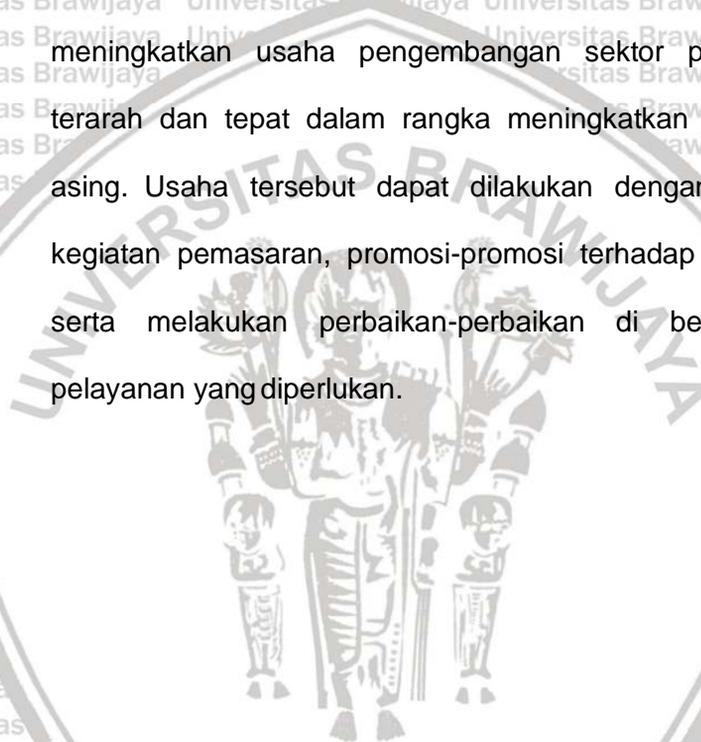
1. Adanya pengaruh upah minimum yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya pengaruh investasi yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Tidak ada pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 5.2. Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Dewan Pengupahan Provinsi, serikat pekerja, dan pengusaha perlu bersama-sama untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan besaran upah, dengan memperhitungkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga keinginan angkatan kerja untuk bekerja semakin tinggi dan pengusaha masih memperoleh keuntungan yang layak dengan UMP yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar tingkat pengangguran dapat berkurang.

2. Untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah daerah dan swasta daerah perlu tindakan pro aktif untuk mendorong peningkatan investasi pariwisata yang mengarah kepada padat karya atau sektor riil, sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran di Provinsi NTB. Terlebih investasi pariwisata merupakan salah satu investasi dengan nominal yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya.
3. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan usaha pengembangan sektor pariwisata yang lebih terarah dan tepat dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan pemasaran, promosi-promosi terhadap objek wisata di NTB serta melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai fasilitas dan pelayanan yang diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

Adella bachtiar. 2010. "Analisis pergerakan nilai tukar rupiah terhadap ekspor komoditas CPO Indonesia" . Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Depok.

Akhmad Syaihu. 2012. "Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur". Samarinda: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No.1

Anzas Fernando Sirait, Yulmardi, dan Adi Bhakti. 2018. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi". Jambi: e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3

BAPPENAS. (2014). *Pembangunan Pariwisata 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Binus Business School. 2019. <https://bbs.binus.ac.id/>. Diakses pada tanggal 9 Juni pukul 13.35 WIB.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram.

\_\_\_\_\_. 2017. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram.

\_\_\_\_\_. 2018. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram.

\_\_\_\_\_. 2019. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram.

\_\_\_\_\_. 2020. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*. Mataram.

Case, Karl. E , Ray C. Fair. 2004. *Principles of Macroeconomics*. 7 th Edition. Prentice Hall Business Publishing.

DepDikNas. 2008. "PENDEKATAN, JENIS, DAN METODE PENELITIAN PENDIDIKAN". Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Desti Dirnaeni., SE, MM. 2018. "Teknik Proyeksi Bisnis". Bekasi: Universitas Gunadarma.

Dewi Rahmawati, Ikka. 2014. "Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur". Surabaya: Jurnal Ekonomi Perencanaan Pembangunan, 2014. Vol. 1, No. 4.

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, M. Ali Sodik, M.A. 2015. "DASAR METODOLOGI PENELITIAN". Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Hardijan Rusli. 2004. "Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU NO 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan". Bogor : Ghalia Indonesia.

Heriawan, R. 2004. Peranan dan Dampak Pariwisata pada Perekonomian Indonesia: Suatu Pendekatan Model IO dan SAM . Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ida Bagus PR, Made Dwi SM. 2014. "PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, LAMA TINGGAL DAN PENGELUARAN WISATAWAN MANCANEGARA TERHADAP PENDAPATAN SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN (PHR) PROVINSI BALI TAHUN 2000-2012". Bali: E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA. Vol.3. No.4.

Joaquín Alegre, Llorenç Pou and Maria Sard. 2018. "High Unemployment and Tourism Participation". Spain: Department of Applied Economics.

Kemenpar. 2018. "LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2017". Jakarta: Kementerian Pariwisata.

LPEM FEB UI. (2018). *Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia.

Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

M.Akrom K. 2014. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATAWAN DI PANTAI CAHAYA, WELERI, KABUPATEN KENDAL". Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.

Ni Luh Emi Damayanti, dan I Nengah Kartika. 2016. "Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi". Bali: E-Jurnal EP. Vol.5. No.7.

Ni Putu & Sudarsana. 2012. "PENGARUH INFLASI, INVESTASI, DAN TINGKAT UPAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI BALI". Bali: E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.2. No.1.

Novlin Sirait dan A A I N Marhaeni. 2013. "Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/ota di PROVINSI BALI". Bali: E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.2 No.2

Nur Fitri Yanti, Haerul Anam, dan Harnida Wahyuni Adda. 2017. "ANALISIS PENGARUH INFLASI, INVESTASI DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI WILAYAH SULAWESI PERIODE 2010-2014". Palu: Jurnal Katalogis. Vol.5. No.4

Rahmadin, Abubakar Hamzah, dan M. Nasir. 2013. "Pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Aceh". Banda Aceh: Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.1. No.4.

Sofyardi. 1999. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Ekonomi". Padang: Penerbit Pusat Studi Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.

Stefan F. Schubert. 2012. "Tourism and unemployment: The effects of a boom in tourism demand on unemployment". Bolzano: Revista Turismo & Desenvolvimento. No.17/18

Sugiyono. 2013. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D". Bandung: ALFABETA

Sadono, Sukirno. 2010. Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Perseda. Jakarta.

Tengko Sarimuda RB dan Soekarnoto . 2014.. "Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011". Surabaya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. No.2

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a, b</sup>		
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.05356589
Most Extreme Differences		
	Absolute	.184
	Positive	.184
	Negative	-.153
Test Statistic		.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Lampiran 2 : Hasil Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	134.761	8.105		16.627	.000		
	Upah	-10.768	.917	-1.466	-11.745	.000	.168	5.970
	Inves	.440	.112	.486	3.924	.001	.170	5.880
	Kunjungan	.687	.817	.136	.841	.413	.100	10.008

a. Dependent Variable: TPT

### Lampiran 3 : Hasil Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.950	1.144	1.116

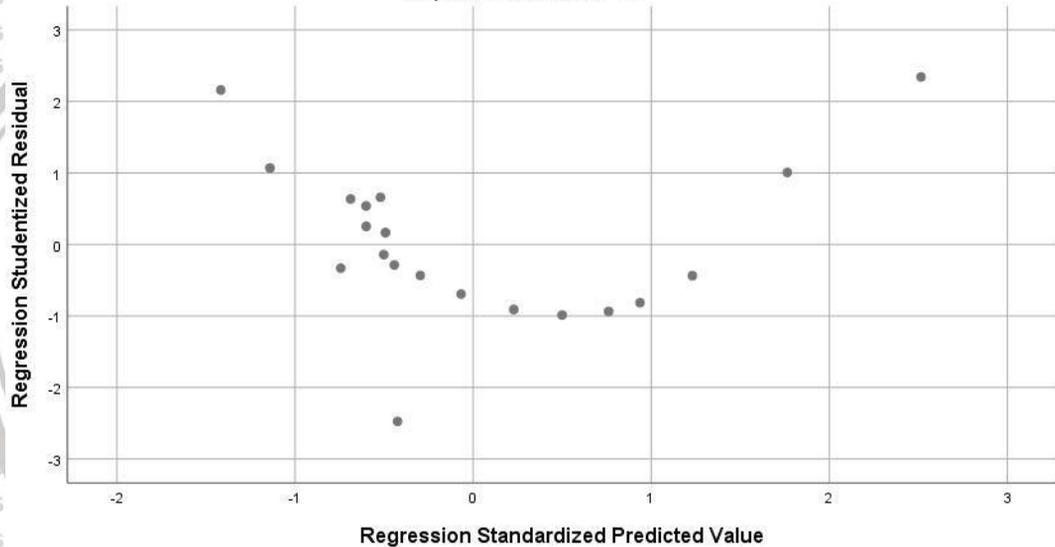
a. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

b. Dependent Variable: TPT

### Lampiran 4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### Scatterplot

Dependent Variable: TPT



## Lampiran 5 : Uji f

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480.025	3	160.008	122.307	.000 <sup>b</sup>
	Residual	20.932	16	1.308		
	Total	500.957	19			

a. Dependent Variable: TPT

b. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

## Lampiran 6 : Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	134.761	8.105		16.627	.000		
	Upah	-10.768	.917	-.1466	-11.745	.000	.168	5.970
	Inves	.440	.112	.486	3.924	.001	.170	5.880
	Kunjungan	.687	.817	.136	.841	.413	.100	10.008

a. Dependent Variable: TPT

## Lampiran 7 : Uji Koefisien Determinasi Ganda

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.950	1.144	1.116

a. Predictors: (Constant), Kunjungan, Inves, Upah

b. Dependent Variable: TPT

## Lampiran 8 : Data Variabel Penelitian

Tahun	TPT	UMP	Investasi Pariwisata	Kunjungan Wisatawan
2000	6.1	160,000	8,633,822	179,014
2001	6.03	240,000	12,950,733	119,343
2002	5.96	320,000	17,267,644	238,686
2003	5.89	375,000	20,235,521	279,710
2004	5.82	412,500	22,259,073	307,681
2005	5.75	475,000	25,631,660	354,299
2006	5.68	550,000	29,678,764	481,101
2007	5.61	645,000	34,805,096	619,370
2008	5.54	730,000	39,391,814	544,502
2009	5.47	832,500	65,601,624	410,241
2010	5.4	890,775	604,682,766	725,388
2011	5.33	950,000	427,871,006	886,880
2012	5.26	1,000,000	146,184,000	1,162,512
2013	5.38	1,100,000	291,686,944,196	1,357,602
2014	5.75	1,210,000	2,060,726,380,240	1,629,122
2015	5.69	1,330,000	2,300,928,713,662	2,210,527
2016	3.94	1,482,950	2,075,303,033,644	3,094,437
2017	3.32	1,631,245	19,437,050,074,035	3,508,903
2018	3.72	1,825,000	11,631,282,735,672	2,812,379
2019	3.42	2,012,610	9,888,148,880,871	2,390,899